

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis finansial global menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian dunia. Perlambatan ekonomi dunia, selain menyebabkan penurunan volume perdagangan dunia, tetapi juga akan berdampak pada banyaknya industri besar yang terancam bangkrut, penurunan kapasitas produksi, dan terjadinya lonjakan jumlah pengangguran dunia. Perlambatan ekonomi merupakan fakta yang dihadapi seluruh negara maju dan berkembang di dunia. Bagi negara-negara berkembang salah satunya Indonesia, situasi ini dapat merusak fundamental perekonomian, dan memicu terjadinya krisis ekonomi (Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI, 2009).

Menghadapi ancaman resesi ekonomi global tersebut, hampir semua negara seakan sepakat untuk mengatasinya dengan mengeluarkan paket kebijakan fiskal. Stimulus fiskal merupakan istilah yang populer saat terjadi krisis global. Stimulus fiskal dianggap sebagai solusi yang efektif dalam meredam masa resesi yang kelam dan merupakan harapan untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia sebagai negara berkembang dianggap berhasil menerapkan kebijakan fiskal, yang mana negara-negara lain justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2010).

Kebijakan fiskal Indonesia bertujuan untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak buruk dari krisis global. Dengan perlambatan perekonomian yang terjadi, penduduk miskin merupakan elemen masyarakat yang paling rentan terkena dampak krisis. Dengan demikian kebijakan fiskal berupa stimulus dilakukan untuk 3 (tiga) tujuan yakni (1) mempertahankan dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat untuk mendapat laju pertumbuhan konsumsi, (2) mencegah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan meningkatkan daya tahan dan daya saing usaha menghadapi krisis ekonomi dunia, dan (3) menangani dampak PHK dan mengurangi tingkat pengangguran dengan belanja infrastruktur padat karya (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2010).

Situasi ekonomi saat ini memerlukan penopang untuk mengatasi perlambatan ekonomi. Konsumsi sebagai penyumbang terbesar di dalam perhitungan pendapatan nasional bagi suatu negara dianggap penopang yang tepat dalam mengatasi perlambatan ekonomi. Konsumsi juga merupakan indikator utama perhitungan terhadap agregat *output* yang dihasilkan suatu negara. Tidak hanya konsumsi, simpanan masyarakat juga berperan penting dalam mengatasi perlambatan ekonomi, yang mana memiliki fungsi yang sama dengan investasi apabila digunakan untuk berbagai kegiatan ekonomi. Investasi merupakan salah satu elemen penting didalam perhitungan pendapatan suatu negara. Bahkan saat ini, motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai beralih dari konsumsi domestik menjadi investasi (Berita Satu, 2012).

Struktur ekonomi Indonesia masih didominasi sektor konsumsi yakni sekitar 62.62 persen dan porsi investasi sekitar 31.69 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah perlambatan ekonomi global karena didorong tingginya permintaan domestik yang berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Dari data tersebut kita bisa mendeteksi sumber utama dari sisi internal mengenai masalah perlambatan ekonomi. Untuk mencari jalan keluar dan mengobati sumber perlambatan ekonomi, pemerintah harus fokus pada sumber penyebab utama tersebut (Hartati, 2015).

Pemerintah perlu menyadari bahwa saat ini tidak bisa mengandalkan sisi eksternal guna mendorong kinerja ekonomi, sehingga mencoba untuk mendorong permintaan domestik melalui investasi maupun konsumsi masyarakat. Kinerja investasi diharapkan dapat terdorong melalui belanja infrastruktur yang meningkat besar, sedangkan konsumsi masyarakat dapat meningkat melalui kebijakan penyesuaian PTKP (Satyagraha, 2015).

Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan strategi dari pemerintah untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri, meningkatkan investasi masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan yang dilakukan pemerintah ini perlu didukung karena akan berimbas positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Darwis, 2012). PTKP adalah suatu besaran yang dijadikan batas oleh pemerintah untuk mengenakan pajak pada penghasilan seseorang. Setiap orang pribadi yang telah

memperoleh penghasilan melewati PTKP wajib membayar pajak penghasilan ke kas negara. Kenaikan PTKP ini juga diharapkan dapat meringankan beban hidup rakyat (Candra, 2012).

Candra (2012) mengungkapkan, di tengah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sekarang ini, memang sudah selayaknya pemerintah menaikkan PTKP. Dengan menaikkan batas PTKP berarti akan semakin banyak penghasilan yang dibawa pulang untuk belanja dan menabung. Tingkat konsumsi masyarakat diharapkan akan semakin meningkat. Dengan bertambahnya tingkat konsumsi, pemerintah akan mendapat setoran pajak dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Seiring dengan perubahan ekonomi di Indonesia, besarnya batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Ketentuan mengenai PTKP diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh (Pajak Penghasilan) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan kebutuhan pokok setiap tahunnya, besarnya PTKP dapat disesuaikan, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2015).

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), PTKP disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter, serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Maka, inflasi dijadikan sebagai dasar perhitungan besarnya PTKP.

Tabel 1. 1 Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Periode 1984-2015

Dasar Hukum	WP sendiri	+ WP Menikah	+ Istri Bekerja	+ Tanggungan Keluarga	Mulai Berlaku
UU No.8 Tahun 1983	960,000	480,000	960,000	480,000	1 Jan 1984
UU No.10 Tahun 1994	1,728,000	864,000	1,728,000	864,000	1 Jan 1995
UU No.17 Tahun 2000	2,880,000	1,440,000	2,880,000	1,440,000	1 Jan 2001
KMK No.564/KMK.03	12,000,000	1,200,000	12,000,000	1,200,000	1 Jan 2005
PMK No.137/PMK.05	13,200,000	1,200,000	13,200,000	1,200,000	1 Jan 2006
UU No.36 Tahun 2008	15,840,000	1,320,000	15,840,000	1,320,000	1 Jan 2008
PMK No.162/PMK.011	24,300,000	2,025,000	24,300,000	2,025,000	1 Jan 2013
PMK No.122/PMK.010	36,000,000	3,000,000	36,000,000	3,000,000	1 Jan 2015

Sumber: HLP Consultant (2015)

Dalam perkembangan perekonomian, Pemerintah menimbang bahwa besarnya PTKP yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Pertimbangan lain mengenai perlunya perubahan PTKP adalah terkait dengan dibutuhkannya kebijakan untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global, sebagai dampak krisis finansial Eropa dan Amerika Serikat, yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Dengan menaikkan PTKP diharapkan dapat meningkatkan pendapatan siap belanja (*disposable income*), yang kemudian berdampak pada konsumsi maupun simpanan masyarakat. Pengeluaran konsumen yang lancar akan berimbas pada kenaikan penjualan barang impor, output manufaktur, bisnis, dan investasi hingga pertumbuhan lapangan kerja (Noor, 2011).

Penyesuaian PTKP sebagai salah satu kebijakan fiskal pemerintah memberikan banyak dampak positif serta solusi untuk mengatasi perlambatan ekonomi. Hampir semua negara seakan sepakat untuk mengatasinya dengan mengeluarkan paket kebijakan fiskal. Walau dunia seakan sepakat untuk mengandalkan kebijakan ini, efektivitas stimulus fiskal sebagai kebijakan *countercyclical* (mengatasi resesi ekonomi) masih menjadi perdebatan. Keefektifan kebijakan dan seberapa besar dampak pengganda (*multiplier effect*) yang dihasilkan menjadi perdebatan, karena efektivitas kebijakan sangat tergantung oleh banyak faktor, terutama bagaimana rumah tangga dapat merespon tambahan pendapatan yang didapat. Hal tersebut menuntut pemerintah sebagai perancang kebijakan harus sangat berhati-hati. Untuk itu, akan menarik mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan penyesuaian PTKP, apalagi mengingat alokasinya yang begitu besar.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak, konsumsi, dan simpanan masyarakat. Penelitian terbatas pada pengeluaran konsumsi rumah tangga dan simpanan masyarakat yang merupakan total tabungan, giro, dan deposit berjangka. Penelitian akan dilakukan terhadap data dari tahun 1984-2015.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak, konsumsi, dan simpanan masyarakat.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak, konsumsi, dan simpanan masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan terkait ilmu perpajakan, serta memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pengaruh pemberlakuan kebijakan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak, konsumsi, dan simpanan masyarakat. Hasil analisis ini memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan PTKP untuk penerimaan pajak, konsumsi, dan simpanan masyarakat untuk kurun periode 1984-2015.

1.5.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam mengevaluasi upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah guna meningkatkan penerimaan pajak, konsumsi, dan simpanan masyarakat, serta memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan penghasilan tidak kena pajak yang selama ini berlaku dan dampaknya terhadap penerimaan pajak, konsumsi, dan simpanan masyarakat

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi secara singkat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi teori, konsep, dan beberapa penelitian terdahulu yang diambil dari berbagai sumber yang diolah dan menjadi dasar bagi penulis untuk mendukung penelitian ini. Uraian teori terkait penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penerimaan pajak, pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan simpanan masyarakat yang dapat memberikan landasan ilmiah tentang perumusan metode, arah penelitian, dan pemecahan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian, antara lain jenis penelitian, populasi dan sampel, objek penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data yang sudah diolah di program SPSS, dan pembahasan yang dikaitkan dengan penelitian terdahulu dan landasan teori.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan implikasi penelitian baik secara teoritis dan empiris. Selain itu, berisi tentang rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yang disertai dengan keterbatasan selama melakukan penelitian.